

## ABSTRAK

### MODEL PEMBIAYAAN PEMELIHARAAN JALAN DARI *EARMARKED TAX* DI INDONESIA (STUDI KASUS: PULAU BALI)

Oleh

**Tiopan Henry Manto Gultom**  
**NIM: 35011009**  
**(Program Studi Doktor Teknik Sipil)**

Salah satu penyebab tidak tercapainya kemantapan jalan adalah pembiayaan pemeliharaan jalan yang tidak mencukupi. Beberapa negara menerapkan pungutan dari pengguna jalan dan dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan khusus untuk jalan. Dana ini dapat digunakan untuk pemeliharaan dan atau untuk pembangunan jalan baru. Sumber pendapatan ada yang berjenis pajak ada yang non pajak. Pendapatan ini disebut sebagai *road fund*. Terdapat tujuh karakteristik implementasi *road fund* yaitu letak geografis, implementasi program, sumber dana, mekanisme pengumpulan dana, fungsi administrasi dana khusus jalan, pemanfaatan dana dari pengguna jalan dan metode alokasi dana. Ketujuh karakteristik tersebut menjadi prinsip aplikasi dana khusus jalan. Negara Indonesia memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan negara-negara yang telah menerapkan dana khusus jalan, seperti secara geografis sebagai negara kepulauan, sistem keuangan, sistem pemerintahan daerah dan mekanisme pengelolaan aset milik Pemerintah (pusat dan daerah). Studi *road fund* di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2001. Pada tahun 2013 diterbitkan peraturan pemerintah yang menyebutkan pengelolaan dana pemeliharaan jalan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri. Pertanyaan penelitian adalah model dana pemeliharaan jalan seperti apa yang paling tepat di Indonesia, sehingga dapat diterbitkan peraturan pemerintah tentang dana pemeliharaan jalan.

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat model pembiayaan pemeliharaan jalan dari *earmarked tax* di Indonesia. Model bisa menjelaskan level implementasi program, tugas badan pengelola dana, sumber dana, mekanisme pemungutan dana, metode alokasi, bentuk badan pengelola dana, dan menghitung tarif *earmarked tax* pada studi kasus di Pulau Bali.

Model yang dibuat adalah model kebijakan pembiayaan pemeliharaan jalan yang bersumber dari *earmarked tax*. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data triangulasi. Metode wawancara yang dilakukan adalah semi-terstruktur. Format *survey* yang digunakan menunjukkan *Strengths*, *Weakness*, *Opportunities* dan *Threats* dari setiap bagian model. Responden dipilih yang bisa mewakili eksekutif sebagai inisiator kebijakan pemerintah.

Validasi model dilakukan dengan metode diskusi panel yaitu *Focus Group Discussion*. Butir-butir utama disepakati ditarik dari hasil pembahasan terakhir di FGD dengan melibatkan semua responden dari pemerintah. Lokasi studi Pulau Bali hanya digunakan untuk menetapkan tarif *earmarked* sesuai dengan kebutuhan dana pemeliharaan jalan di lokasi studi. Alat bantu yang digunakan untuk menghitung kebutuhan dana pemeliharaan jalan adalah program RNET Versi 2..

Model pembiayaan pemeliharaan jalan yang paling tepat diterapkan di Indonesia adalah model pembiayaan yang dikelola pada provinsi yang berada di satu pulau, sumber pendapatan dari pembiayaan berasal dari *earmarked* PBBKB, PKB dan PPNBM. Pengelolaan dana dilakukan oleh suatu badan yang berbentuk badan layanan umum. Badan ini berfungsi sebagai penjamin anggaran pemeliharaan jalan yang stabil dan merencanakan penggunaan anggaran pemeliharaan jalan. Hasil perencanaan anggaran diserahkan ke otoritas jalan eksisting sebagai daftar ruas jalan yang dipelihara. Otoritas jalan melakukan kontrak pelaksanaan pemeliharaan jalan dengan kontraktor pelaksana. Terdapat dua jenis badan layanan umum dalam satu pulau, yaitu badan layanan umum milik pemerintah pusat yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jalan nasional, ini disebut BLUN. Kedua adalah badan layanan umum milik daerah yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jalan provinsi dan kabupaten/kota, ini disebut BLUD. Di Pulau Bali, tarif *earmarked* PKB sebesar 0,5% dan PBBKB sebesar 5% tidak mencukupi kebutuhan dana pemeliharaan jalan. Dibutuhkan dana subsidi dari pemerintah pusat, diusulkan bersumber dari *earmarked* PPNBM kendaraan bermotor. Estimasi potensi pendapatan dari *earmarked* PPNBM adalah sekitar 42 triliun/tahun.

Kata kunci: model, pembiayaan, dana pemeliharaan jalan, *earmarked tax*

## **ABSTRACT**

### **A MODEL OF ROAD MAINTENANCE FUNDING FROM EARMARKED TAX IN INDONESIA (CASE STUDY: BALI ISLAND)**

By

**Tiopan Henry Manto Gultom**

**NIM: 35011009**

**(Doctoral Study Program of Civil Engineering)**

*One of the causes of underachieving in road stability is due to insufficient funding of road maintenance. Some countries impose charges on the road users, and therefore it is used as a singular source of income for the road. The income can be utilized for either maintaining or constructing a new road. The source of income can be classified either as a tax or as a non-tax and then known as road fund. There are seven characteristics of the implementation of the road fund, namely geographical location, implementation of the program, source of fund, fund-raising mechanism, special road fund administration function, utilization of fund from road users and method of fund allocation. Those seven characteristics become the implementation principles of road fund. Indonesia has some different characteristics with other countries having already implemented the special road fund, such as geographical island country, financial system, local government system, and government-owned asset management mechanism (central and local). The studies of road fund in Indonesia have been being conducted since 2001. In 2013, the government issued regulations stating that the fund management of road maintenance was stipulated in separated government regulation. The research question is which model of road maintenance fund will be the most appropriate in Indonesia, so that the government can create a regulation about road maintenance fund.*

*The purpose of this research is to create a model of road maintenance funding from earmarked tax in Indonesia. The model can explain the level of program implementation, the tasks of fund management body, the sources of funds, the fund collection mechanisms, the methods of allocation, the form of fund management body, and the calculation of the rate of earmarked tax in the case study on the Bali Island.*

*The created model is a financing road maintenance policy model, based on the earmarked tax. The research method is qualitative research, with triangulation data collection technique. The interviewing method is semistructured. The used survey format is intended to show Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats from each part of the model. The respondents are selected to represent the*

*executives as the initiators of government policy. The model validity is conducted with the method of panel discussion, namely Focus Group Discussion (FGD). The final main points is drawn according to the result of the last discussion in FGD by involving all respondents from the government. The research location, Bali Island, is only used for setting the rate of earmarked in accordance with the needs of road maintenance in the research area. The tool to calculate the road maintenance fund is the RNET Version 2 program.*

*The most appropriate road maintenance funding model to be applied in Indonesia is the financing model managed in the province in one island, while the sources of the funding comes from earmarked of PBBKB, PKB and PPnBM. The fund management is conducted by an institution in the form of public service institution. The institution serves as the guarantor of a stable road maintenance budget and the planner of the usage of road maintenance budget. The result of budget planning is submitted to the existing road authority as a list of maintained roads. The road authority implements a contract of road maintenance with the field contractor. There are two types of public service institutions in the island, namely the state-owned institution which is responsible for maintaining national roads, called as BLUN. The other is a local public service institution which is responsible to maintain province, district, and city roads, called as BLUD. In Bali Island, the PKB earmarked rate is 0.5%, and PBBKB rate is 5%, which is not sufficient for the road maintenance fund. The central government needs to subsidize the fund, which is suggested from the earmarked PPnBM of the motor vehicles. The estimated potential revenue from the earmarked PPnBM is about Rp. 42 billion/year.*

*Keywords: model, funding, road maintenance funds, earmarked tax*